

KPK harus segera tangkap “Begal Anggaran” di DKI Jakarta

Kisruh APBD DKI Jakarta tahun 2015 memasuki posisi yang kritis. DPRD menyatakan menggunakan hak angket dengan alasan terjadi pelanggaran dalam pengesahan APBD 2015 versi Pemprov ke Kemendagri. Disisi lain, Gubernur Basuki Tjahaya Purnama telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan adanya dana siluman senilai Rp. 12 Triliun di APBD 2015 terkait beberapa proyek.

Peta Kisruh

Alasan	DPRD DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta
Tahapan Pembahasan	Ada dua versi APBD 2015, yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur untuk kepentingan review berbeda dengan hasil kesepakatan paripurna DPRD.	
Satuan Tiga		Gubernur mengungkap ada beberapa asnggaran siluman, satu diantaranya terkait dengan dana 12 Triliun.
Langkah Kebijakan	Mengajukan hak Angket terkait dugaan pelanggaran 11 Aturan Hukum.	Melaporkan dugaan dana siluman ke KPK.
Penyelesaian Pengesahan APBD DKI 2015		Mengajukan Permohonan Fasilitasi ke Kemendagri

Secara jernih, bagaimanapun APBD DK Jakarta 2015 harus segera disahkan untuk memperlancar pembangunan insfrastuktur dan belanja public seperti kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena ini, FITRA berpendapat bahwa :

- 1. DPRD DKI Jakarta untuk membatalkan penggunaan Hak Angket**, karena terlalu di politisir menjadi 11 aturan yang dilanggar, padahal permasalahan hanya pada administrasi penyerahan APBD 2015 untuk di review Kemendagri. Dan Kemendagri mengembalikan karena ada beberapa dugaan yang tidak transparan.
- 2. DPRD tidak berhak mengelola anggaran Negara.** Kewenangan pembahasan anggaran untuk legislatif sebenarnya hanya pada mengoreksi dan menyetujui (UU MD3 No. 17 Tahun 2014 dan Tatib DPRD

DKI Jakarta), hal ini dikuatkan dengan putusan MK. Kewenangan DPRD bukan mengalokasi dan mengelola anggaran (dana siluman). DPRD bisa jadi justru melanggar sendiri aturan ini.

3. **Kemendagri harus secepatnya memediasi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta agar APBD 2015** segera disahkan, agar pembangunan Infrastruktur Nasional di Jakarta tetap berjalan.
4. **Gubernur DKI Jakarta dan DPRD sebaiknya membuka Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)** dalam RAPBD 2015 kepada publik sebagai uji publik. Hal ini juga merupakan pembelajaran transparansi dan akuntabilitas anggaran.
5. **KPK untuk segera menangkap siapa saja “Begal Anggaran”** APBD DKI Jakarta.

Demikian

Apung Widadi,
Koordinator Advokasi dan Investigasi
SEKNAS FITRA
085293939999\512CF41E